

IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA KARANG AGUNG, TANJUNG PALAS UTARA, BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2023

Toha Nurdiansah^{1*}, Ane Permatasari²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Indonesia

²SDGs Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Indonesia.

*Korespondensi: tohanurdiansyah@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program jaminan sosial yang paling populer di Indonesia dengan beragam manfaat dan kendalanya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT DD oleh Pemerintah Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan indikator untuk menjadi tolok ukur keberhasilan program yang sedang berjalan seperti efisiensi, efektivitas, pemerataan, kecukupan, responsifitas, dan ketetapan. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Karang Agung telah berhasil dengan baik dalam melaksanakan program ini di wilayahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya cara yang paling efektif dan efisien berupa pelibatan Masyarakat dalam proses penyaluran sehingga meminimalisasi terjadinya gejolak di Masyarakat.

Kata kunci: Implementasi; Program; BLT-DD; Desa

ABSTRACT

Direct Cash Transfer (BLT) is one of the most popular social security programs in Indonesia with various benefits and obstacles. The purpose of this study was to determine the implementation of the Village Fund Cash Assistance program or BLT DD by the Karang Agung Village Government, Tanjung Palas Utara Sub-district, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. This research used a qualitative method with a descriptive approach. In this study, indicators were used to measure the success of the ongoing program such as efficiency, effectiveness, equity, adequacy, responsiveness, and permanence. The results of this paper show that the Karang Agung Village Government has succeeded well in implementing this program in its area. This is evidenced by the most effective and efficient way of involving the community in the distribution process so as to minimize the occurrence of turmoil in the community.

Keywords: Implementation; Program; BLT-DD; Village.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dari adanya krisis kesehatan dari pandemi ini, masyarakat juga sangat tertekan dengan adanya ancaman krisis sosial dan ekonomi sebagai akibat dari terbatasnya aktivitas secara ideal.

Dengan adanya ancaman krisis sosial dan ekonomi, perlu diingat bahwa pada masa awal pandemi Covid-19, isu tentang data penerima Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat sasaran menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan disikapi. Meskipun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, Kementerian Sosial berusaha memperbarui data yang ada untuk berbagai program yang sedang berjalan.

Pasca berakhirnya pandemi Covid-19, dengan adanya tantangan-tantangan ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi yang masih berjalan, sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dengan serius masyarakat yang rentan miskin. Maka, program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan sangat membantu kesulitan Masyarakat.

Selain itu dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh Pemerintah Desa Karang Agung tersebut sangat menarik untuk dikaji dalam memaksimalkan program BLT-DD tersebut agar mencapai hasil yang diharapkan bersama.

B. METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha menemukan dan menggambarkan secara deskriptif kegiatan dan dampak dari sebuah tindakan yang sedang dilakukan

(Setiawan, 2018). Selain itu, metode ini juga dilakukan dengan melakukan analisis data-data yang didapatkan di lapangan. Pendekatan ini juga lebih menekankan pada proses deskripsi dan analisis secara mendalam dengan berdasarkan pada data yang ada secara teliti. Hal tersebut akan sesuai dengan deskripsi Frankel (1998;379-402) yang menyampaikan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. data primer yang berasal dari pencarian data lapangan menjadi instrumen utama pada penelitian ini,
2. dilakukan proses display data dan dikumpulkan melalui kata serta gambar
3. memperhatikan proses dan bentuk produk,
4. menganalisis data,
5. dan fokus agar sebuah masalah dapat mudah dipahami.

Proses pengambilan data wawancara lapangan penelitian ini dilakukan di Tanggal 10-20 Desember tahun 2023. Lokasi pengambilan data adalah Desa Karang Agung, Kabupaten Tanjung Palas Utara, Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi ini dipilih karna lokasi yang strategis, lokasi desa yang tidak dekat dengan dengan kota kabupaten, tetapi termasuk desa maju dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Dengan karakteristik tersebut peneliti memiliki persepsi bahwa desa tersebut dapat menjadi representasi pelaksanaan program Bantuan langsung Tunai secara umum di Daerah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

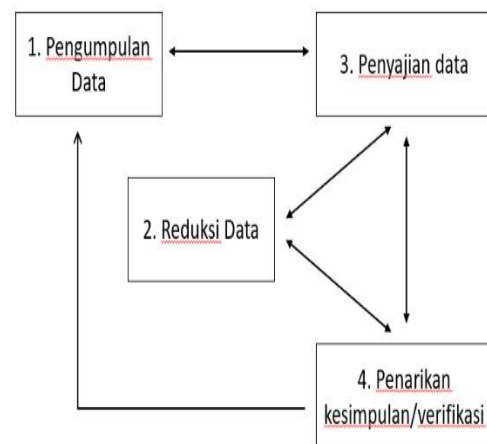
Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder: 1) Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung pada saat

proses pengambilan data, dapat berupa hasil wawancara lapangan dengan narasumber, responden atau informan yang relevan terkait dengan data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data melalui wawancara menurut Chesley(Tanujaya,2017) merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur ataupun tidak, guna mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti. 2) Data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain untuk merepresentasikan hasil yang didapat, data ini dapat digunakan sebagai pembandingan dalam proses penelitian ini. Memanfaatkan media yang telah ditulis seperti arsip data, sosial media, web artikel, artikel jurnal, ataupun media berita, akan menjadi data sekunder dari penelitian ini.

Analisis data ialah proses menggabungkan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara, kajian pustaka, serta dokumentasi kemudian menganalisis dan memproses data yang diperoleh untuk kemudian dijabarkan berdasarkan dengan kategori yang ada, lalu disimpulkan dan disajikan menjadi pembahasan yang menarik dan mudah dipahami. Muhadjir dalam sebuah tulisan mengartikan analisis data sebagai upaya yang dilakukan guna mencari dan menata dengan sistematis setiap catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti pada kasus yang diteliti, menyajikannya sebagai temuan pada orang lain kemudian untuk meningkatkan pemahaman pada masalah maka perlu dilanjutkan dengan mencari makna(Rijali, 2019). Pendapat lain menyatakan analisis data ialah berkerja dengan data, mengordinasikan, memilah data menjadi satuan, mensistemasikan data,

menemukan yang penting dan dapat di pelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan pada orang lain, sebagaimana disampaikan Bogdan dan Bikler dalam Wandu et al(2013).

Dari hasil gambaran diatas maka penelitian ini menggunakan Teknik analisis data interaktif yang di populerkan Miles dan Huberman (1992:90). Komponen teknik analisis dapat digambarkan sebagai berikut:



Setelah dilakukan Pengumpulan data lapangan baik primer ataupun sekunder. Reduksi data ialah proses penyederhanaan materi, abstraksi dan tranformasi hasil data kasar yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data merupakan kegiatan hasil dari reduksi data, dimana penyajian data adalah ketika data/informasi yang telah disusun guna memepermuda proses analisis dan penarikan sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam model ini, peneliti sudah berusaha mencari kesimpulan sejak awal penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Bantuan Langsung Tunai di Indonesia

Bantuan Langsung Tunai atau secara singkat disebut (BLT), merupakan salah

satu program perlindungan yang dimiliki Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.10 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri sosial No.04 Tahun 2015 tentang bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana, bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT adalah *"bantuan yang diberikan dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar tetap hidup secara wajar"*. Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 menjadi peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020, terlihat berusaha mengembangkan kembali potensi penerapan program bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang lebih luas dimasa pandemi, dengan menambahkan unsur terkait dengan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah dilaksanakan sejak 2020, dimana program ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan sebagai proteksi kepada masyarakat rentan dan miskin yang tidak termasuk kedalam penerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, atau program bantuan lain yang sedang berjalan dikala itu.

2. Kendala Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Indonesia

Pada masa awal pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun 2020 bersamaan dengan masa pandemi, didasarkan asas perubahan yang diusung oleh Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020 bahwa peraturan tersebut

bermaksud memperluas penerima dengan sedikit melonggarkan kriteria atas dasar kegawatdaruratan, meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan atau pasca bencana.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laman resminya yang berjudul "Data tak valid, Penyaluran BLT Desa Beresiko salah sasaran"(Wartaperiksa, 2023), dalam tulisannya menggambarkan bagaimana pelaksanaan program BLT Desa, berdasarkan data yang pelaksanaan program tersebut sebenarnya belum tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian pada Semester ke 2 tahun 2022, terdapat minimal 2 masalah yang dituliskan dimana permasalahan pertama ada 9.068 (22,16%) dari 40.921 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 1.288 desa di 26 Kabupaten tidak memenuhi syarat kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan yang ke dua, terdapat paling tidak 164.340 kepala keluarga pada 541 desa di 15 Kabupaten yang memenuhi syarat sebagai kriteria dan termasuk dalam kategori miskin tidak menerima perlinsos dan tidak ditetapkan sebagai penerima BLT-DD.

3. Implementasi Bantun Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Karang Agung

Pemerintah Desa Karang Agung tentu juga melaksanakan program Perlinsos (Perlindungan Sosial) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), karena BLT-DD merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan melalui desa dengan menggunakan anggaran desa yang bersumber dari APBN. Selain itu, Pemerintah Desa Karang Agung juga telah melaksanakan realisasi program anggaran sejak terjadinya Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 lalu. Sebagai salah satu jaring sosial yang ada, apabila masyarakat desa

terdampak Pandemi Covid-19 dan membutuhkan bantuan sosial tetapi belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program perlindungan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dll. Pemerintah Desa Karang Agung Memfasilitasi pendataan dari adanya kendala tersebut.

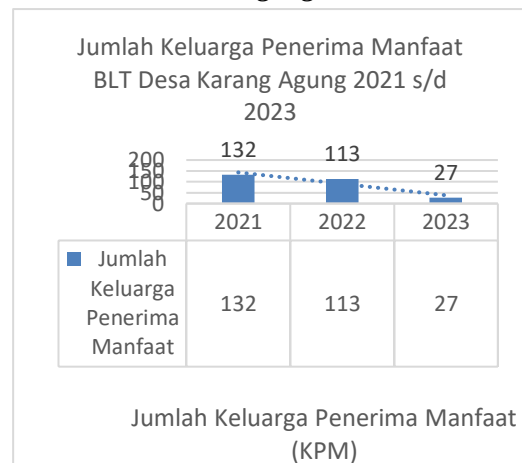
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan bapak Yosua, S.IP. (Sekretaris Desa Karang Agung) pada wawancara yang dilakukan peneliti, bahwasannya *“BLT Desa sendiri tercetus pada saat pandemi covid 19, dimana bantuan tersebut diperuntukan bagi Masyarakat terdampak yang fungsinya untuk membantu masarakat miskin supaya juga dapat melaksanakan kehidupannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok karna disaat pandemi akses pekerjaan sangat terbatas”*. Selain program BLT DD, program bantuan yang masuk dan berjalan di wilayah desa karang agung sejak tahun 2021 hingga sekarang adalah PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Eman Mustika (Ketua BPD) *“Kalau bantuan sosial lain memang sudah lama sebelum BLT-DD ini, seperti PKH (Peogram Keluarga Harapan) dan BPNT memang sudah lama ada di desa karang agung dan masih berlangsung sampai sekarang juga”*.

Seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 39, Sarat keluarga penerima manfaat BLT dana desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan, dan (2) tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu

Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosia Tunai, Dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya. Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD senilai Rp. 300.000,00- Rupiah dibuat dan ditetapkan pemerintah desa melalui mekanisme yang ada.

Pelaksanaan bantuan langsung tunai yang anggaranya berasal dari anggaran desa atau Dana Desa merupakan program pemerintah yang didasarkan pada azas kedaruratan, masih menjadi dasar dalam pelaksanaan program ini sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 namun dengan penyesuaian perubahan prioritas anggran desa, dan pada tahun 2023 BLT DD tetap menjadi prioritas program pemerintah dalam penuntasan kemiskinan ekstrim, karna pemberantasan kemiskinan masih menjadi program prioritas pemerintah, hanya saja jumlah penerima manfaat yang jauh berkurang bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Jumlah KPM Desa Karang Agung



Kemudian berdasarkan azas kedaruratan diatas, dari data dokumen Lampiran Peraturan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2021, Perubahan Atas Peraturan

Kepala Desa, dalam keputusannya Kepala Desa Karang Agung menetapkan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa karang agung, total penerima manfaat BLT-DD desa karang agung pada tahun 2021 adalah 132 penerima manfaat. Ditahun 2022 jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mulai berkurang, dimana pada tahun 2022 Pemerintah Desa Karang Agung menetapkan hanya 113 penerima. Dan di tahun 2023, jumlahnya kembali mengalami penurunan jumlah penerima manfaat BLT DD dengan sangat drastis yang hanya berjumlah 27 orang, dimana hal ini sejalan dengan perubahan prioritas desa yang terdapat dalam Pasal 5 (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yang lebih berfokus pada penuntasan kemiskinan ekstrem.

a. Efektivitas

Dalam konteks ini diartikan sebagai hasil sebuah kebijakan, dan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan. Menurut Gibson et.al 1996, dalam (Nisa & Setiawati, 2022) Efektivitas merupakan penilaian yang dibuat atas prestasi individu, kelompok, atau organisasi dalam mencapai standar yang direncanakan, semakin dekat dengan standar semakin efektif. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai alat ukur keberhasilan capaian atau tujuan yang telah ditetapkan (Putri, 2019).

Menurut bapak yossua, S.Ip, Program Bantuan Langsung Tunai sudah sesuai dengan harapan pemerintah desa dimana program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya pada masa pandemi. Dimana ini menjadi penting pada saat kritis terutama

Masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT. Seperti yang di sampaikan Ibu Sunyanah (Isteri bapak Suminto) *“yah cukup nda cukup, karna semua itu kan tanggungan pemerintah ya, walapun kecil kecil ya lumayan buat makan hari-hari”*. Namun, sebagaimana disampaikan oleh bapak Yosua (Sekretaris Desa Karang Agung) Tujuan dari diberikannya bantuan langsung tunai dana desa *“agar dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat yang sifatnya stimulan hingga kemudian Masyarakat dapat mandiri”*. Maka dengan sifatnya sebagai stimulan, secara efektif Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat membantu atau mengurangi sebagian beban masyarakat penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

b. Efisiensi

Menurut Sedarmayanti, 2017, hal.112 dalam Patentius (2022) Efisiensi merupakan daya guna yang menekankan tidak hanya pada hasil, tapi juga pada usaha dan daya untuk mencapai keberhasilan dengan upaya paling optimal.

Pelaksanaan penyaluran bantuan oleh pemerintah desa karang agung, dilakukan dengan melibatkan langsung tokoh masyarakat sehingga diharapkan keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan merupakan yang memang paling membutuhkan. Dengan usaha yang minimal melalui musyawarah Desa yang melibatkan banyak tokoh, diharapkan mencapai kesepakatan Bersama. Walaupun dari hasil penelusuran yang ada di masyarakat, ternyata pemerintah desa sudah tidak melakukan verifikasi lapangan, namun memanfaatkan ketua-Ketua RT yang berperan aktif dan mengetahui kondisi Masyarakat diwilayahnya. dan seluruh

biaya pada pelaksanaan program BLT DD ini berasal dari anggaran desa dan atau dalam hal ini alokasi dana desa (ADD).

c. Kecukupan

Kecukupan atau cukup berkaitan dengan memenuhi kebutuhan, memenuhi keperluan, yang dimaksud dengan kecukupan ialah sejauh mana capaian yang diinginkan oleh pemerintah desa Karang Agung. Menurut bapak yosua, Pemerintah desa karang agung melaksanakan program ini menyesuaikan kebijakan yang mengatur penggunaan dana desa, pada tahun 2021 dengan memaksimalkan anggaran yang senilai wajib 25-35 % pagu anggaran alokasi dana desa, sedangkan pada tahun 2022 karna alokasi pagu anggaran minimal 40% maka pemerintah desa mengambil nilai minimal yaitu 40%, dan pada tahun 2023 dengan prioritas anggaran yang berubah, maka jumlah alokasi yang diatur menurun menjadi maksimal 10% pada pagu anggaran dana desa tahun 2023. Namun jika melihat kembali kebutuhan anggaran yang dialokasikan pemerintah desa yang menurun setiap tahun, belum tentu menjadi pertanda yang positif. Dari tjuan langsung dimasyarakat walalui wawancara, ditemukan ada beberapa informasi yang menyatakan ada masyarakat yang sudah rentan namun belum mendapat bantuan.

bapak Eman juga berbicara tentang kecukupan “*Kalo cukup apangga nya ini, mungkin semua minta dibantu*”. Pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyalurkan bantuan, sehingga dengan jumlah penerimanya juga mengalami penurunan setiap tahunnya, sebagai bukti bahwa BLT-DD dapat membantu masyarakat agar tidak jatuh kedalam kemiskinan.

d. Pemerataan

Chapra,2000 dalam tulisan yang publish oleh Juliana et al., (2018) pemerataan ialah ketika distribusi kebutuhan berhasil dipenuhi secara merata tanpa menimbulkan kegaduhan. Berkaitan dengan pemerataan pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Karang agung, juga tokoh RT dan tokoh masyarakat berusaha memaksimalkan anggaran dan penerima manfaat sesuai dengan anggaran yang dicanangkan, melalui musyawarah desa Pemerintah desa juga terus memetakan masyarakat kurang mampu sehingga jumlahnya setiap tahun terus berkurang.

bapak Yosua (Sekretaris desa) bukan berarti akan semakin banyak masyarakat renta yang akan terlantar, namun hanya dialihkan keprogram bantuan lain, “*Menurunnya penerima BLD DD ini juga di dukung dengan adanya program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan)*”. Menurut ibu dewi (Kepala Seksi Pelayanan) dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa beliau yakin bantuan yang disalurkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan disampaikan secara merata.

e. Ketepatan

Ketepatan ketelitian atau tepat berkaitan dengan hasil yang diinginkan apakah sudah tepat pada sasaran yang diinginkan atau ditetapkan sebelumnya. Program BLT-DD sangat membantu masyarakat menjaga taraf hidup mereka tetap stabil dalam bencana pandemi yang terjadi Pada tahun 2021 lalu dengan banyaknya program bantuan yang dibuat oleh pemerintah. Pada saat ini program pemerintah tentang jaring sosial yang berjalan di desa karang agung adalah BLT DD, Program Keluarga Harapan (PKH) dan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga masyarakat kurang mampu dan miskin diharapkan sudah terserap seluruhnya dalam program program yang ada walaupun jumlah penerimanya terus berkurang.

Guna meminimalisir gejala yang terjadi akibat dari penyaluran BLT, maka pemerintah desa berupaya sebaik mungkin dalam memilih para calon penerima bersama dengan pejabat RT dan tokoh masyarakat yang ada di desa karang Agung. Dari 27 KPM di 2023 8 orang yang menjadi sampel menyatakan bahwasannya BLT DD ini memiliki nilai sendiri di Masyarakat walaupun tidak dapat sepenuhnya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan nilai bantuan yang senilai Rp 300.000,00 Rupiah.

f. Responsifitas

Responsifitas atau daya tanggap menurut Widodo(2001) adalah sikap dasar yang harus dimiliki dalam proses implementasi, daya tanggap yang dimaksud ialah terhadap masalah, keluhan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat (Nurani et al., 2015) dalam hal ini juga berkaitan dengan sejauh mana keterlibatan dan respon masyarakat dalam pelaksanaan program yang sedang dijalankan.

Namun bila bicara tentang tingkat kepuasan masyarakat kepada program BLT ini belum tentu bisa memuaskan seluruh masyarakat. Tergambar dalam narasi yang disampaikan bapak yosua *“Namun jika dikatakan program ini memuaskan bagi Masyarakat itu masih tergantung pada mindset cara berpikir Masyarakat”*. Karna nilai bantuan yang tidak mencukupi seluruh kebutuhan hidup masyarakat, namun hanya dapat membantu beberapa keperluan, seperti yang disampaikan oleh bapak Eman Mustika *“kalo dibilang mencukupi ya tidak*

mencukupi Cuma membantu memenuhi kecukupan Keluarga penerima manfaat”.

4. Kendala Pelaksanaan Program BLT-DD

Dalam proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di desa karang Agung, seperti pada umumnya program pemerintah pada dasarnya tidak mampu memuaskan seluruh Masyarakat. Menurut Eman Mustika selaku Ketua BPD Desa Karang Agung kendala yang dialami saat melaksanakan program ini ialah kriteria miskin itu sendiri, karna *“yang benar-benar memenuhi kriteria itu minim disini. kenapa minim, karna dari kriteria tersebut hanya 1 atau 2 item saja yang memenuhi syarat”* sehubungan dengan kriteria yang digunakan adalah kategori Masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang misalnya rumah dengan berinding kayu murah/bambu jumlahnya sangat minim didesa karang Agung, dan hampir hilang (karna sdh diberikan bantuan rumah), sehingga masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang ada akan sangat sedikit.

Dalam setiap pelaksanaan program pemerintah biasanya akan selalu timbul riak atau gejala yang timbul dalam prosesnya, begitu pula dalam pelaksanaan BLT DD ini, pada pandemi melanda desa karang Agung di tahun 2021, Pada tahun 2021 banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat (BST) dan sisanya akan di cover menggunakan BLT DD untuk masyarakat terdampak pandemi desa karang Agung yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai.

g. Manfaat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pada prosesnya pelaksanaannya, Program BLT DD ini menjadi sangat efektif dalam membantu perekonomian

Masyarakat selama pandemi dalam menjaga Masyarakat agar tidak kelaparan disaat mereka kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2022 merupakan masa percepatan pemulihan ekonomi nasional yang dapat membantu Masyarakat dalam jika ekonominya keluarga Masyarakat penerima manfaat belum sepenuhnya stabil, dan tahun 2023 prioritas dialihkan program BLT menjadi ujung tombak dalam penuntasan kemiskinan ekstrem dan hanya disalurkan kepada lansia yang sudah tidak kuat mencari nafkah atau yang memiliki 3) penyakit kronis.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam menilai proses Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Maka didapati hasil sebagai berikut:

- 1) Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan melalui alokasi Dana Desa yang diatur oleh pemerintah pusat baik prioritas penggunaan anggaran ataupun porsi anggarannya, pemerintah pusat. Pelaksanaan program BLT DD di Desa Karang Agung ini melalui proses pelaksanaan yang ringkas sehingga dapat menjadi sangat efektif dan efisien, dimana hanya melalui 3 mekanisme yaitu 1) Musyawarah Desa; 2) Verifikasi Vaktual; 2) Verifikasi Vaktual.
- 2) Tidak banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program ini, karna program ini merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat guna

menyalurkan bantuan yang dapat membantu perekonomian masyarakat selama masa pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dimandatkan kepada pemerintah desa. Dinamika lain yang terjadi adalah ada proses penggantian antar waktu nama penerima pada yang lebih layak menerima ditengah-tengah berjalannya program, dimana melalui perubahan Peraturan Kepala Desa.

Manfaat yang dirasakan dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, jelas dirasakan Keluarga penerima manfaat. Karna dimasa covid-19 keluarga terdampak pandemi yang tidak termasuk dalam penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) akan dirangkul dengan program BLT-DD. sehingga mengurangi resiko ekonomi yang lebih dalam pada keluarga rentan di desa karang agung. Dan di tahun 2023 keluarga penerima manfaat adalah mereka yang sudah lanjut usia dan tidak dapat mencari nafkah lagi, walaupun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam 1 bulan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Admin 1. (2023, September 7). *Data Tak Valid, Penyaluran Blt Desa Berisiko Salah Sasaran – Warta Digital*. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?P=44091>
- Akib, A. (2020). Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Iain Kendari. *Shautut Tarbiyah*, 26(1), Article 1. <https://doi.org/10.31332/Str.V26i1>.

- 1441
- Anggara, Sahya. (2014). 8. *Buku Kebijakan Publik.Pdf*. Cv. Pustaka Jaya. [Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/11004/1/8.%20buku%20kebijakan%20publik.Pdf](http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/11004/1/8.%20buku%20kebijakan%20publik.Pdf)
- Anggara, Dr. S. (2014, December). 8. *Buku Kebijakan Publik.Pdf*. [Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/11004/1/8.%20buku%20kebijakan%20publik.Pdf](http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/11004/1/8.%20buku%20kebijakan%20publik.Pdf)
- Apriyani, R. (2020). *Kesimpangsiuran Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Ditengah Pandemi Covid-19*. 6.
- Arapah, N. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Dan Sembako Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemic Covid 19 Di Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi (Manajemen Perusahaan) Dan Bisnis*, 4(02), Article 02. <https://doi.org/10.51512/jimb.v4i0.2.58>
- Azizah Mayasari, N. (2020a). *Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt-Dd) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Penelitian Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. [Http://Eprints.Umpo.Ac.Id/5960/](http://eprints.umpo.ac.id/5960/)
- Azizah Mayasari, N. (2020b). *Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt-Dd) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Penelitian Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. [Http://Eprints.Umpo.Ac.Id/5960/](http://eprints.umpo.ac.id/5960/)
- Badan Pusat Statistik. (2022, July 15). <https://www.bps.go.id/pressreleases/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- Blt Dana Desa 2022: Kriteria, Besaran, Dan Sanksi. (2022, January 4). *Desa Bungko*. <https://bungko.desa.id/2022/01/blt-dana-desa-2022-kriteria-besaran-dan-sanksi/>
- Bpkp Sebutkan Masalah Data Penyaluran Blt Dana Desa. (2020, Oktober). Bpkp Sebutkan Masalah Data Penyaluran Blt Dana Desa. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/bpkp-sebutkan-masalah-data-penyaluran-blt-dana-desa>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015. *Menara Ilmu*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2408>
- Ekonomi 2022 Diproyeksi Meningkat. (2022, February 10). *Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian*. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/ekonomi-2022-diproyeksi-meningkat/>

- Garis, R. R., & Desfirani, L. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid—19. *Musamus Journal Of Public Administration*, 4. [Http://Ejournal.Unmus.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/View/3586](http://Ejournal.Unmus.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/View/3586)
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2021). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32812.21.1.2020>
- Hidayatulloh, A. N. (2020). Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat Dalam Kajian Program Keluarga Harapan: Tinjauan Empirik Dampak Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Penerima Manfaat. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(2), Article 2. <https://doi.org/10.31105/mipks.v43i2.2142>
- [Indikator Kemiskinan]—Aplikasi Database Kesra Provinsi Kalimantan Utara. (N.D.). Retrieved December 1, 2022, From <https://simkesra.kaltaraprov.go.id/web/findikator-kemiskinan>
- [Indikator Kemiskinan]—Aplikasi Database Kesra Provinsi Kalimantan Utara. (2017). <https://simkesra.kaltaraprov.go.id/web/findikator-kemiskinan>
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>
- Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3824>
- Khomaini, A. A. (2020). Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) Terhadap Kesejahteraan Subyektif Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.161>
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30702>
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *Adalah*, 4(1), Article 1.
- Muharir, M., & Hariani, R. (2021). Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Blt Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (Kpm) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang. *Integritas Jurnal*

- Manajemen Profesional (Ijupro)*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.35908/Ijupro.V2i1.85>
- Nanggulan - Blt Dana Desa Dan Permasalahannya. (2020, July 3). Nanggulan - Blt Dana Desa Dan Permasalahannya.
<https://nanggulan.kulonprogokab.go.id/detil/720/blt-dana-desadan-permasalahannya>
- Nisa, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Japb*, 5(1), Article 1.
- Noerkaiser, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.33105/Jmp.V2i1.363>
- Nurani, A. S., Zauhar, S., & Saleh, C. (2015). Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif New Public Service. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(04), 213–220.
<https://doi.org/10.21776/Ub.Wacana.2015.018.04.1>
- Patentius, P. (2022). Pengaruh Komunikasi, Penjadwalan, Dan Kejelasan Job Description Terhadap Efisiensi Kerja Karyawan Pada Pt. Dimas Star. *Emabi: Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(2), Article 2.
- Perekonomian Kalimantan Utara Tumbuh 5,24% Pada Kuartal Iii-2021 | Databoks*. (2021, November 12). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/12/perekonomian-kalimantan-utara-tumbuh-524-pada-kuartal-iii-2021>
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa.